

## **SOSIALISASI PENGUATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL BERBASIS 5 ASAS PERJUANGAN BUNG KARNO (Refleksi dan Penelusuran Identitas Kampus Nasionalis)**

Johan Erwin Isharyanto<sup>1</sup>, Adhi Putra Satria<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, [johan-erwin@untagsmg.ac.id](mailto:johan-erwin@untagsmg.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This article is the result of dedication and socialization activities aimed at examining and analyzing the principles of Bung Karno's struggle, as well as their relevance to the implementation of higher education in Indonesia. This article emphasizes the exploration of views, ideas, and concepts based on data, both secondary and primary data, which are then presented descriptively qualitatively. The results of the analysis and literature review show that towards the principles of Bung Karno's struggle in his ideas include 5 main principles, namely, among others, the radical-revolutionary principle, *machtvorming*, mass-action, non-cooperation, self-help & self-reliance. These principles have relevance to the implementation of higher education especially in campuses characterized by nationalism, where these principles can be used as guidelines in determining the content of how internal quality assurance standards are made, implemented, and consistently implemented to achieve graduates who truly have character and true nationalist spirit..*

**Keywords:** *Principles of Struggle; Nationalism; Internal Quality Assurance Standards*

### **ABSTRAK**

*Artikel ini merupakan artikel hasil pengabdian dan agenda kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis asas-asas perjuangan Bung Karno, serta relevansinya atas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Artikel ini lebih menekankan pada penelusuran atas pandangan, gagasan serta ide yang didasari atas data, baik data sekunder maupun data primer, atas data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis dan tinjauan literatur menunjukkan bahwasanya terhadap asas perjuangan bung karno dalam idenya meliputi 5 asas utama yaitu antaralain, asas radikal-revolusioner, *machtvorming*, massa-aksi, nonkooperasi, self-help & self-reliance. Asas-asas sebagaimana dimaksud memiliki relevansi dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama di kampus-kampus yang bercirikan nasionalis, dimana asas-asas tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan isi bagaimana standar penjaminan mau internal dibuat, dilaksanakan dan di implementasikan secara konsisten demi terwujudnya lulusan yang benar-benar berkarakter dan berjiwa nasionalis sejati.*

**Kata Kunci:** *Asas Perjuangan; Nasionalisme; Standar Penjaminan Mutu Internal.*

### **PENDAHULUAN**

Nasionalisme merupakan sebuah paham yang sangat berkontribusi dalam membentuk suatu negara, sejarah mencatat bahwa nasionalisme telah mendorong kesadaran akan identitas bersama di antara warga negara. Nasionalisme ini telah mengikat individu-individu dengan rasa solidaritas terhadap satu negara, bahasa, budaya, dan sejarah yang sama. Kesadaran identitas inilah yang kemudian

memainkan peran penting dalam membentuk ikatan sosial yang kuat untuk kemudian membuat kesepakatan dalam membentuk suatu negara dengan pola dan pandangan yang sama.<sup>1</sup>

Didalam konteks nasionalisme dalam membentuk suatu negara di wilayah asia cenderung merujuk pada konsep ikatan sosial yang kuat dan pandangan yang sama diantara warga negara untuk melakukan berbagai perlawanan atas adanya kolonialisme dan imperialisme yang terjadi, sehingga perlawanan tersebut pada akhirnya mampu mewujudkan suatu negara yang Merdeka. Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat dipahami bahwa gerakan nasionalis asia seringkali memimpin perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan asing atau kekuatan eksternal. Paham nasionalisme mendorong warga negara untuk bersatu dan berjuang bersama-sama untuk menegakkan kedaulatan dan otonomi negara.<sup>2</sup>

Secara etimologis, istilah Nasionalisme berasal dari dua kata, yaitu "nation," yang merujuk kepada suatu kelompok bangsa, dan "isme," yang menunjukkan paham atau ideologi. Jika digabungkan, Nasionalisme mengacu pada paham cinta terhadap bangsa atau tanah air. Lebih lanjut, kata "nation" sendiri berasal dari kata "nascie," yang mengandung makna kelahiran. Oleh karena itu, "nation" merujuk pada kelompok bangsa yang terbentuk melalui ikatan kelahiran. Dari perspektif antropologis dan sosiologis, bangsa menggambarkan sebuah komunitas kehidupan yang berdiri sendiri. Setiap anggota dalam komunitas ini merasa sebagai satu kesatuan yang didasari oleh kesamaan ras, bahasa, agama, sejarah, dan budaya. Dengan demikian, konsep bangsa mencakup identitas kolektif yang didefinisikan oleh faktor-faktor seperti keturunan, bahasa yang digunakan, keyakinan agama, sejarah bersama, dan tradisi budaya.<sup>3</sup>

Ide Nasionalisme dalam konteks negara Indonesia sendiri adalah suatu konsep yang melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini adalah gambaran ikatan budaya yang kuat yang menyatukan rakyat Indonesia yang majemuk menjadi satu bangsa dalam satu entitas negara-bangsa. Nasionalisme menciptakan rasa persatuan di antara warga negara, terlepas dari perbedaan etnis, bahasa, agama, dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Salah satu peran penting nasionalisme adalah menciptakan identitas bersama. Identitas ini melampaui perbedaan individual dan regional, menggambarkan kesadaran bersama akan sejarah, budaya, dan masa depan bersama sebagai satu bangsa.

---

<sup>1</sup> Moh. Fakhruddin Farhan, "Peran Nasionalisme Dalam Kemandirian Bangsa Dan Kemandirian Industri Pertahanan," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.8156>.

<sup>2</sup> Mudji - Hartono, "NASIONALISME ASIA TIMUR: SUATU PERBANDINGAN JEPANG, CINA, DAN KOREA," *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21831/moz.v4i1.4388>.

<sup>3</sup> Suyatno, "Unsur Nilai Nasionalisme Indonesia Sebagai Jiwa Pemersatu Bangsa," *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2021).

Identitas ini mendorong warga negara untuk merasa memiliki negara mereka, berkontribusi dalam membangunnya, dan melindunginya dari ancaman luar.<sup>4</sup>

Nasionalisme bukan hanya dapat dipahami sebagai suatu “isme” yang menuntut adanya perlawanan dalam mempertahankan bangsa dengan cara-cara konvensional, nasionalisme di masa globalisasi dan kemajuan teknologi juga dapat dipahami sebagai paham yang lebih menojolkan identitas diri dan memiliki rasa bangga dan cinta atas identitas individu sebagai suatu bangsa. Konsep nasionalisme dimasa globalisasi dan digitalisasi telah mengalami dinamikanya sendiri, isu-isu kebanggaan atas jati diri sebagai suatu bangsa merupakan potret nyata bahwa saat ini telah terjadi degradasi nasionalisme, terutama di Indonesia. Isu 1000 mahasiswa yang memilih untuk pindah kewarganegaraan, pemuda/pemudi yang lebih memilih prodak luar, mengikuti life style negara lain merupakan isu nyata yang tidak bisa terbantahkan lagi.<sup>5</sup>

Pernyataan diatas diperburuk lagi dengan isu sentimen SARA, dimana Masyarakat Indonesia lebih memilih mencintai identitas suku agama dan rasnya dibandingkan dengan membanggakan identitas sebagai warga negara Indonesia. Hal demikian dapat dibuktikan dengan data yang dirilis pada 2017, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menunjukkan “hanya 58,5% responden yang lebih suka mengidentifikasi diri sebagai warga Indonesia, sisanya 25,8% dan 12,5% berturut-turut lebih membanggakan identitas agama dan etnisnya masing-masing. Data ini menunjukkan bagaimana rasa kepemilikan generasi muda terhadap negara sendiri mengalami dekadensi yang cukup signifikan. Meski demikian, setahun kemudian, tingkat kebanggaan atas jati diri kebangsaan melonjak menjadi 61,4%. Sebaliknya, identifikasi agama dan etnis menjadi masing-masing 22,7% dan 13,4%. Meningkatnya rasa nasionalisme ini bukan berarti perjuangan untuk terus membumikan prinsip-prinsip nasionalisme ini harus berhenti. Sebaliknya, perjuangan merumputkan Nasionalisme harus terus digaungkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada fakta dan problematika nasionalisme diatas, kampus-kampus berideologi Nasionalisme-Pancasila memiliki beban moral dalam mengawal dan menciptakan kader-kader yang berjiwa Nasionalisme-Pancasila melalui pengembangan dalam dunia akademik. Klaim terhadap kampus

---

<sup>4</sup> Elisa Puspita Ratri and Fatma Ulfatun Najicha, “URGensi PANCASILA DALAM MENANAMKAN Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi,” *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455>.

<sup>5</sup> Novia Eka Widiastuti, “Lunturnya Sikap Nasionalisme Generasi Milenial Terhadap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,” *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i2.44>.

<sup>6</sup> Febriana Sulistya Pratiwi, “Survei: Semangat Nasionalisme Anak Muda Dirasa Makin Turun,” *Data Indonesia*, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-semangat-nasionalisme-anak-muda-dirasa-makin-turun>.

berideologi Nasionalisme-Pancasila perlu dilakukan elaborasi untuk kemudian diaktualisasikan secara nyata dalam segala sendi-sendi kehidupan akademik. Namun demikian terdapat suatu permasalahan prinsip tentang konsep nasionalisme seperti apa yang menjadi ciri dan karakter yang ditetapkan di kampus-kampus yang mengklaim sebagai kampus nasionalis, dalam arti kampus yang berbasis pada prinsip keagamaan pun telah dapat dikatakan bercirikan Nasionalis-Pancasilais jika mengacu pada penetapan standar kelulusan perguruan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan prinsip diatas maka, perlu dilakukan penekanan dalam bentuk sosialisasi kepada struktur pejabat di lingkungan kampus nasionalis yang mencoba memberikan konsep kampus nasionalis-pancasilais yang berbasis pada 5 Asas Perjuangan Bung Karno sebagai pembeda ciri khas nasionalisme UNTAG dengan kampus-kampus lainnya. 5 Asas Perjuangan Bung Karno ini dapat dijadikan dasar dan landasan dalam membuat Standar Penjaminan Mutu Internal, khususnya Standar Non Akademik yang akan memberikan nuansa pembeda dalam menciptakan lulusan UNTAG yang lebih menonjolkan bentuk dan karakter nasionalisme yang berbeda dengan karakter nasionalisme dikampus lainnya.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan dalam sosialisasi Penguatan Standar Penjaminan Mutu Internal Berbasis 5 Asas Perjuangan Bung Karno meliputi berbagai langkah dan strategi yang terintegrasi. Pertama, dilakukan analisis atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu nasionalisme dan inventarisir data untuk memahami akan kebutuhan pemahaman nilai nasionalisme di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya adalah dilakukannya pengenalan dengan mengadakan sosialisasi di lingkungan kampus yang dipilih, yaitu kampus Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang dalam hal ini peserta yang dilibatkan adalah seluruh jajaran tim penjaminan mutu. Pemilihan kampus Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebagai lokasi workshop atau sosialisasi disebabkan karena, UNTAG Semarang merupakan kampus Nasionalis-Pancasilais, selain itu di UNTAG Semarang sedang dilaksanakan peninjauan dan penyesuaian standar penjaminan mutu internal yang disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, sehingga dirasa pas apabila pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di Kampus UNTAG Semarang. Selain itu pada tahap ini dilakukan pemberian materi mengenai konsep standar penjaminan mutu internal yang didasarkan pada nilai nasionalisme bung karno.

Tahap terakhir adalah praktik penyusunan standar penjaminan mutu internal yang didasarkan pada nilai nasionalisme bung karno. Penyusunan artikel ini

menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan empiris, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa bahan yang sudah ada seperti regulasi atau dokumen resmi lainnya, bahan hukum sekunder berupa data yang bersumber dari studi kepustakaan dan bahan hukum tersier berupa data KBBI serta kamus hukum

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sosialisasi dan pemberian materi tentang asas perjuangan Bung Karno**

Asas perjuangan Bung-Karno akan tampak dan di pahami dari konsep tentang sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme, 5 Asas Perjuangan Bung Karno dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Radikal-Revolusioner**

Radikal-revolusioner yaitu perubahan berdasarkan kehendak zaman yang cepat. Dalam konteks perjuangan, maka radikal revolusioner merupakan perubahan secara cepat yang menginginkan berakhirnya masa imperialisme dan hal-hal yang terkait dengan penindasan serta perampasan hak secara paksa. Radikalisme di dalam kekuatan perjuangan bangsa sangat penting sekali. Radikal dimaknai sebagai hal yang tidak boleh dilakukan setengah-setengah, harus dilakukan dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka dari itu, bung karno selalu menegaskan tentang pentingnya rakyat yang radikal revolusioner, karena tidak ada perjuangan yang bisa mendobrak penjajahan di atas tanah Indonesia tanpa mereka yang benar-benar memiliki pemikiran dan sikap yang radikal revolusioner.<sup>7</sup>

#### **b. Machtvorming**

Machtsvorming, didefinisikan sebagai penyusunan kekuatan dan pengaturan tenaga, adalah suatu elemen kunci dalam perjuangan Marhaenisme. Gerakan ini tidak dapat berjalan secara efektif kecuali didukung oleh proses pembentukan dan pengaturan kekuatan yang kuat. Bung Karno memahami bahwa dalam dunia politik, menciptakan ideologi hanyalah langkah awal; yang paling penting adalah merancang dan mengorganisir kekuatan yang dapat menjalankan dan menjalankan ideologi tersebut. Oleh karena itu, machtsvorming, atau dalam kata lain,

---

<sup>7</sup> Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiati Asyiah, and Deni Chandra, "Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Sukarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 19, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33301>.

penyusunan kekuasaan yang berlandaskan ideologi, adalah kunci dalam perjuangan Marhaenisme melawan penindasan dan ketidakadilan.<sup>8</sup>

c. Massa-Aksi

Massa-aksi mengacu pada seluruh kekuatan yang mendukung perjuangan, berasal dari semua lapisan masyarakat di Indonesia. Massa-aksi ini terdiri dari jumlah massa yang sangat besar, bukan hanya ribuan, tetapi jutaan. Lebih khususnya, massa-aksi ini merupakan dukungan yang diberikan oleh kaum Marhaen yang terlibat dalam aksi perjuangan. Bung Karno menekankan bahwa massa-aksi bukan sekadar konsep di masa depan, melainkan adalah sesuatu yang sedang berlangsung saat ini. Kekuatan massa-aksi ada dalam kehidupan sehari-hari kita, mereka yang terorganisir dalam berbagai aspek, seperti yang menulis artikel di surat kabar, membentuk perkumpulan, mengadakan pertemuan, atau melakukan demonstrasi; semuanya adalah bagian dari perjuangan massa-aksi kaum Marhaen.<sup>9</sup>

d. Nonkooperasi

Kemudian, non-kooperasi mengacu pada sikap untuk tidak bekerja sama dengan pihak penjajah. Apabila rakyat atau massa bekerja sama dengan penjajah, maka mencapai kemerdekaan Indonesia akan menjadi sulit. Non-kooperasi mencerminkan sikap tanpa kompromi terhadap pihak Belanda dan sebenarnya gagasan non-kooperasi ini pertama kali diungkapkan oleh Moh. Hatta pada tahun 1923, yang mengutamakan persatuan dan menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pemahaman non-kooperasi antara Sukarno dan pandangan Hatta.<sup>10</sup>

Menurut Bung Karno, untuk menggulingkan kekuasaan kolonial, akan terjadi pertentangan kepentingan antara penjajah dan rakyat yang terjajah, dan pertentangan inilah yang memberi keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kemerdekaan tidak akan terwujud jika rakyat Indonesia menjalankan politik non-kooperasi. Keyakinan ini kemudian menjadi sumber konflik antara Sukarno dan Hatta pada tahun 1932. Saat itu, Bung Hatta pernah ditawarkan untuk menjadi anggota parlemen Belanda, sehingga

---

<sup>8</sup> Vhiasyah Racinady and Jagad Aditya Dewantara, "PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM AJARAN MARHAENISME," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2293>.

<sup>9</sup> Ruskana Putra Marhaen, "Belajar Memahami Marhaenisme," *Jurnal Pembumian Pancasila* 2, no. 1 (2022).

<sup>10</sup> Antonius Dieben and Robinson Manurung, "RELEVANSI, REVITALISASI, DAN REAKTUALISASI MARHAENISME, MENJAWAB KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN BANGSA," *Jurnal Pembumian Pancasila* 2, no. 1 (2022).

Bung Karno merasa cemas dan menganggap bahwa hal tersebut dapat membahayakan kelompok nasionalis. Ia yakin bahwa penjajah dan rakyat Indonesia tidak bisa mencapai kesepakatan.

Sukarno menganggap asas non-kooperasi sebagai alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Menolak menjadi anggota parlemen Belanda dianggap sebagai tindakan yang mulia dan bukan anarki. Sebaliknya, menurutnya, yang berpotensi menciptakan kekacauan adalah jika rakyat menolak duduk dalam parlemen nasional. Hatta, bagaimanapun, memandang bahwa Sukarno telah memaknai non-kooperasi secara berbeda, menganggapnya sebagai dogma yang bersifat radikal, yang hanya berfungsi sebagai senjata untuk mencapai kemerdekaan. Sukarno sangat meyakini bahwa non-kooperasi dapat memobilisasi massa-aksi dan *machtsvorming*.

e. Self-Help & Self-Reliance.

Self-help & self-reliance memiliki makna yang penting dalam konteks ini. Self-help, atau kemandirian, menggambarkan konsep bahwa suatu bangsa harus mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Ini sejalan dengan apa yang Bung Karno sebut sebagai "kemandirian bangsa," yang menjadi indikator kemajuan suatu bangsa. Dalam kerangka ini, hal ini sangat berkaitan dengan asas-asas sebelumnya. Sebab, pihak imperialis cenderung enggan memberikan hak-hak yang diinginkan oleh negara yang tengah dijajah. Karena itu, suatu bangsa harus, entah dengan senang hati atau terpaksa, berusaha mandiri dalam berbagai aspek. Dengan kata lain, bangsa tersebut tidak lagi perlu bergantung pada negara lain.

Di sisi lain, self-reliance, yang lebih menekankan pada kepercayaan diri, adalah konsep yang masih terkait erat dengan gagasan Bung Karno tentang kemandirian, tetapi lebih menekankan pada keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Self-reliance menunjukkan bahwa suatu bangsa harus percaya pada dirinya sendiri dan memahami bahwa memiliki kemandirian berarti menjadi kreatif, otentik, serta memiliki keyakinan dalam diri. Dalam konsep ini, bangsa Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan masalah dan menemukan jalan keluar sendiri tanpa terlalu banyak bergantung pada pihak lain. Semua ini didasari oleh nilai-nilai perjuangan yang dianut dalam upaya mencapai kemandirian sesuai dengan ajaran Bung Karno.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Cici Eliya Melawati and Kuswono, "Marhaenisme: Telaah Pemikiran Sukarno Tahun 1927-1933," *Swarnadwipa* 2, no. 3 (2018).

## **2. pelaksanaan pembentukan Dokumen SPMI sebagai Penguatan standar penjaminan mutu internal berbasis 5 asas perjuangan Bung Karno**

Sebelum mengelaborasi mengenai bagaimana 5 asas perjuangan bung karno yang dapat dijadikan pedoman dan konsep dalam pembentukan Standar Penjaminan Mutu Internal di kampus-kampus nasionalis, maka hal yang perlu di pahami diawal adalah tentang apa itu SPMI.

SPMI, atau Sistem Penjaminan Mutu Internal, merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengontrol dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara mandiri dan terencana. Ini memungkinkan setiap perguruan tinggi untuk mengatur dan mengembangkan SPMI sesuai dengan karakteristik, misi, dan visi mereka sendiri, tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konteks SPMI, setiap perguruan tinggi memiliki kewenangan dan otonomi penuh untuk merancang sistem penjaminan mutu internal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing universitas. Ini termasuk aspek-aspek seperti sejarah, nilai-nilai dasar yang mengilhami pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi yang mereka tawarkan, dan sumber daya yang tersedia.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan SPMI sejatinya memuat standar-standar yang ditetapkan dan merupakan bagian dari pedoman bagi universitas dalam menyelenggarakan aktifitas akademik.<sup>13</sup> Pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan gagasan pembentukan standar SPMI yang ideal yang didasarkan pada 5 Asas Perjuangan Bung Karno sebagaimana telah dibahas, dimana konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Makna asas radikal revolusioner sebagai standar kelulusan yang diatur didalam SPMI

Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya tentang apa itu radikal-revolusioner yang dapat dipahami sebagai sesuatu individu yang berkarakter menghendaki adanya perubahan secara drastis dari berbagai aspek ataupun sistem yang ada dan menyesuaikannya pada dinamisnya zaman, maka secara langsung ataupun tidak langsung, peran kampus nasionalis perlu memastikan bahwa didalam SPMI perlu mengatur dan menetapkan standar pembelajaran dan standar kelulusan yang menuntut mahasiswa untuk selalu terbuka dan berfikir global, mahasiswa mampu

---

<sup>12</sup> Opan Arifudin, "Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 3, no. 1 (2019).

<sup>13</sup> I Made Pater, I Made Yudana, and Nyoman Natajaya, "Studi Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Mutu," *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.23887/jp2.v3i1.24364>.

mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan sistem yang ada, dan mampu memberikan terobosan dan inovasi sesuai bidang yang dipelajarinya.

- b. Makna asas *Machtvorming* sebagai standar kelulusan yang diatur didalam SPMI

Kata *Machtvorming* memiliki makna sebagai penyusunan kekuatan/ penyusunan kekuasaan, atas asas ini sejatinya kampus-kampus nasionalis perlu menetapkan standar kelulusan dimana mahasiswa perlu memiliki keterampilan khusus dalam hal berkomunikasi, berorganisasi dan menjadi pemimpin dalam segala bidang, dimana pemimpin disini memiliki makna kekuasaan yang dimiliki mahasiswa dalam mempengaruhi atas kebijakan strategis baik di level organisasi Masyarakat maupun diorganisasi pemerintahan.

- c. Makna asas *Massa-Aksi* sebagai standar kelulusan yang diatur didalam SPMI

*Masa-aksi* sebagaimana dijelaskan, pada dasarnya adalah suatu Masyarakat yang mengadakan perbuatan atau pergerakan, *masa-aksi* disini adalah Masyarakat yang berdasarkan keterampilannya dapat menyuarakan suara keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat Indonesia, sehingga kampus nasionalis perlu menetapkan standar kelulusan didalam SPMI bahwa mahasiswa yang lulus perlu setidaknya memiliki suatu keterampilan, baik keterampilan dibidang pekerjaan, maupun keterampilan dalam bidang keprofesiannya, dimana keterampilan yang dimiliki itu Ketika dipakai dapat dipahami sebagai suatu Gerakan/pergerakan masa yang berusaha untuk menyuarakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.

- d. Makna asas *Nonkooperasi* sebagai standar kelulusan yang diatur didalam SPMI

Asas *Non-Kooperasi* adalah suatu asas dimana pada dasarnya seluruh setiap Masyarakat Indonesia memiliki perlawanan atas ketidakadilan dengan cara melakukan penolakan melalui pembangkangan sipil dalam rangka melawan berbagai potensi dan penindasan yang dapat memperpanjang garis kemiskinan dan penderitaan rakyat. Sehingga kampus nasionalis perlu menanamkan sikap sebagai standar kelulusan mahasiswa yang memiliki sikap tidak ingin bekerjasama dan anti terhadap suatu sistem yang dapat berpotensi merugikan Masyarakat.

- e. Makna asas self-reliance sebagai standar kelulusan yang diatur didalam SPMI

Self-help & self-reliance, secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu konsep berdikari, dimana masing-masing orang mampu hidup diatas kaki sendiri dan percaya atas kemampuan sendiri. Sehingga kampus-kampus nasionalis perlu menetapkan standar kelulusan dimana selain mahasiswa memiliki keterampilan khusus, mahasiswapun perlu memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan karir dan usaha nya dalam mewujudkan kemakmuran bagi dirinya sendiri dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.



## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kelima asas perjuangan Bung Karno, yaitu Radikal-Revolusioner, Machtvorming, Massa-Aksi, Nonkooperasi, dan Self-Reliance, memiliki relevansi yang signifikan dalam membentuk standar penjaminan mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi nasionalis. Dalam konteks SPMI, asas-asas tersebut dapat diartikan sebagai panduan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, membangun kekuatan sosial dan politik, berpartisipasi aktif dalam perjuangan sosial, menentang sistem yang tidak adil, dan mengembangkan kemandirian serta kepercayaan diri. Dengan mendasarkan SPMI pada asas-asas ini, perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dalam membentuk mahasiswa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perjuangan bangsa dan siap untuk berkontribusi dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Arifudin, Opan. "Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 3, no. 1 (2019).
- Dieben, Antonius, and Robinson Manurung. "RELEVANSI, REVITALISASI, DAN REAKTUALISASI MARHAENISME, MENJAWAB KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN BANGSA." *Jurnal Pembumian Pancasila* 2, no. 1 (2022).
- Farhan, Moh. Fakhruddin. "Peran Nasionalisme Dalam Kemandirian Bangsa Dan Kemandirian Industri Pertahanan." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i2.8156>.
- Febriana Sulistyia Pratiwi. "Survei: Semangat Nasionalisme Anak Muda Dirasa Makin Turun." *Data Indonesia*, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-semangat-nasionalisme-anak-muda-dirasa-makin-turun>.
- Hartono, Mudji -. "NASIONALISME ASIA TIMUR: SUATU PERBANDINGAN JEPANG, CINA, DAN KOREA." *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21831/moz.v4i1.4388>.
- Marhaen, Ruskana Putra. "Belajar Memahami Marhaenisme." *Jurnal Pembumian Pancasila* 2, no. 1 (2022).
- Melawati, Cici Eliya, and Kuswono. "Marhaenisme: Telaah Pemikiran Sukarno Tahun 1927-1933." *Swarnadwipa* 2, no. 3 (2018).
- Pater, I Made, I Made Yudana, and Nyoman Natajaya. "Studi Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dalam Rangka Mewujudkan Budaya Mutu." *Jurnal Pedagogi Dan Pembelajaran* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23887/jp2.v3i1.24364>.
- Pratama, Febri Fajar, Ai Kusmiati Asyiah, and Deni Chandra. "Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Sukarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa

- Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 19, no. 1 (2022).  
<https://doi.org/10.24114/jk.v19i1.33301>.
- Puspita Ratri, Elisa, and Fatma Ulfatun Najicha. “URGENSI PANCASILA DALAM MENANAMKAN JIWA NASIONALISME PADA GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI.” *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022).  
<https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7455>.
- Raeinady, Vhiasyah, and Jagad Aditya Dewantara. “PEMIKIRAN SOEKARNO DALAM AJARAN MARHAENISME.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2293>.
- Suyatno. “Unsur Nilai Nasionalisme Indonesia Sebagai Jiwa Pemersatu Bangsa.” *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2021).
- Widiastuti, Novia Eka. “Lunturnya Sikap Nasionalisme Generasi Milenial Terhadap Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.” *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 3, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/10.52483/ijsted.v3i2.44>.

**P**